

JURNAL ANTROPOLOGI

ISSN 1410-8356

Tahun V, Nomor 7, Januari -Juni 2004

Membangun Ekonomi Nagari : Realita dan Harapan
..... WERRY DARTA TAIFUR

Nagari dan Pasar : Dialektika Opsi Kultural Masyarakat Lokal
..... NURSYIRWAN EFFENDI

Makanan dan Gizi Dalam Konteks Sosial Budaya
..... YEVITA NURTI, SRI MEIYENTI

*Refleksi Metodologis : Penelitian di Desa Purwakarta,
Kec. Rawamerta, Kab. Karawang*
..... SRI SETYAWATI

Dimensi Tindakan dan Motivasi dalam Kemiskinan
..... SYAHRIZAL, SRI MEIYENTI

Antropologi Pariwisata
..... ERMAYANTI

Korupsi dari Sudut Pandang Antropologi
..... ADRI FEBRIANTO

*Analisis Undang-undang Perkawinan
No. 1 tahun 1974 Dalam Perspektif Gender*
..... HENDRAWATI

Reforma(s) Agraria : Suara dari Minangkabau
..... DAMSAR

Resensi Buku : Menghilangnya Bau Magis Dalam Basirompak
..... SURYADI

*Reinterpretasi Tanggung jawab Sosial terhadap
Orang tua dan Mamak dalam Masyarakat Minangkabau*
..... AFRIDA



Raymond Firth

LABORATORIUM ANTROPOLOGI
JURUSAN ANTROPOLOGI FISIP UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2004

DAFTAR ISI

JURNAL ANTROPOLOGI TAHUN V No. 7 Januari – Juni 2004

	Halaman
Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar	iii
<i>Membangun Ekonomi Nagari : Realita dan Harapan</i> WERRY DARTA TAIFUR	1
<i>Nagari dan Pasar : Dialektika Opsi Kultural</i> NURSYIRWAN EFFENDI	12
<i>Makanan dan Gizi Dalam Konteks Sosial Budaya</i> YEVITA NURTI, SRI MEIYENTI	33
<i>Refleksi Metodologis : Penelitian di Desa Purwa Karta, Kec. Rawamerta, Kab. Karawang</i> SRI SETYAWATI	46
<i>Dimensi Tindakan dan Motivasi dalam Kemiskinan</i> SYAHRIZAL, SRI MEIYENTI	54
<i>Antropologi Pariwisata</i> ERMAYANTI	65
<i>Korupsi dari Sudut Pandang Antropologi</i> ADRI FEBRIANTO	78
<i>Analisis Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Dalam Perspektif Gender</i> HENDRAWATI	95
<i>Reforma(si) Agraria :Suara dari Minangkabau</i> DAMSAR.....	119
<i>Resensi : Menghilangnya Bau Magis Dalam Basirompak</i> SURYADI	132
<i>Reinterpretasi Tanggung jawab Sosial terhadap Orang tua dan Mamak dalam Masyarakat Minangkabau</i> AFRIDA.....	147

KORUPSI DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI

Oleh : Adri Febrianto¹

Abstract

This essay is about corruption, collusion and nepotism (korupsi, kolusi dan nepotisme / KKN) phenomena in Indonesia. KKN is seen from cultural changes in Indonesia society. Modernization and cultural changes from rural to urban society did not change subculture familism mental, what cause KKN. Correctly education is supposed to reduce this familism mental.

A. Pendahuluan

Akronim 'KKN' sudah begitu populer di Indonesia, bukannya konsep Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan mahasiswa dahulu, tetapi adalah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Populernya akronim tersebut maka seolah-olah sudah menjadi kosa kata biasa saja dan dapat dibaca hampir setiap hari di media masa. Bahkan sampai di kalangan anggota DPR yang notabene seharusnya adalah 'orang-orang bersih, dan wakil rakyat', tidak pantas melakukan KKN yang populer tersebut. Beberapa waktu yang lalu

banyak berita yang membicarakan anggota DPR memperoleh kekayaan yang luar biasa secara mendadak, setelah menjadi anggota dewan. Para politisi yang merasa menjadi sasaran tuduhan tersebut berdalih bahwa pertambahan kekayaan mereka berasal dari 'hibah', satu konsep lain yang menimbulkan perdebatan. Kasus terakhir yang menghebohkan adalah hilangnya kekayaan negara yang disebut dana non bujeter melalui Badan Urusan Logistik sejumlah 54,6 miliar rupiah yang menyebabkan ketua

¹ Dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu – ilmu Sosial, Universitas . Negeri Padang.

DPR Akbar Tanjung divonis tiga tahun penjara.

Korupsi uang negara secara besar-besaran terjadi di Indonesia dimulai pada kasus Pertamina pada saat dikomandani oleh Ibnu Sutowo, seorang militer yang tugaskan pada jabatan sipil dengan dalih dwi fungsi ABRI oleh pemerintahan Orde Baru. Selama jabatan direktur diduduki oleh Ibnu Sutowo, Pertamina terus menerus mengalami kerugian, padahal minyak dari bumi Indonesia terus mengalir. Setelah itu banyak kasus korupsi besar lainnya sampai sekarang.

Sejak pemerintahan Orde Baru KKN marak terjadi. Korupsi terjadi pada hampir setiap lembaga pemerintahan, bahkan departemen agama sekalipun. Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menjadi ajang pengerukan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan yang sangat disayangkan pada level yang paling rendah dari kantor pemerintah seperti kelurahan masih ada pungutan yang harus dibayar dalam melakukan satu urusan administratif, seperti dalam hal pembuatan KTP, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara terkorup pertama

di Asia dan keempat di dunia.¹ 'Dalam dasawarsa 1950-an ada seorang dosen universitas di Yogyakarta pada sebuah seminar mengatakan, bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya.'² Karena sudah demikian buruknya korupsi di Indonesia, maka sudah menjadi rahasia umum apabila seorang pegawai negeri yang baru menduduki jabatan yang *basah*, dengan segera pula perubahan secara ekonomis terjadi pada dirinya dan keluarganya. Soemitro Joyohadikusomo sebagai penasihat keuangan pemerintahan Soeharto beberapa waktu yang lalu pernah mensinyalir besarnya korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan menyatakan raibnya dana anggaran belanja negara sekitar 30 persen.

Walaupun demikian tidak sedikit pula para ahli atau anggota masyarakat yang tidak sependapat. Masih banyak pejabat instansi pemerintah atau

¹ Data terakhir dari Transparency International menempatkan Indonesia pada urutan ke-96 dari 102 negara yang tingkat korupsinya yang rendah, artinya Indonesia adalah negara ke-7 dari 102 negara tersebut yang mempunyai kasus korupsi yang tinggi. Lihat *Kompas*, 9 Maret 2003,

² Solo Soemardjan, 1998. dalam Pengantar Edisi Indonesia buku Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*. Hal.xiii.

swasta yang idealis, yang tidak korupsi, walaupun kesempatan atau peluang terbuka untuk melakukannya. Adalah sangat tidak tepat kalau yang salah sudah pada level kebudayaan, yang mau tidak mau semua masyarakat pendukungnya sudah begitu massif dan permisif terhadap tindakan-tindakan korupsi yang berlangsung di sekitarnya. Menurut Masduki, ada bahaya yang kurang disadari ketika korupsi diidentitaskan sebagai budaya. Apalagi kalau dikatakan korupsi berurat akar pada budaya asli bangsa ini.³

Maka munculnya pertanyaan mengapa korupsi begitu marak terjadi di Indonesia, perlu dicari jawabannya secara antropologis. Antropologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan sosial yang *concern* dengan kebudayaan melihat korupsi merupakan suatu bentuk penyelewengan atau tindakan yang menyimpang (*deviant*) yang tentunya terkait dengan masalah hukum, moral, dan nilai-nilai atau kebudayaan pada masyarakat Indonesia. Apakah dengan maraknya korupsi menandakan telah mulai longgarnya nilai-nilai atau

norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat? Apakah korupsi memang berurat akar pada nilai-nilai asli bangsa ini?

B. KKN

Kurangnya penelitian antropologi mengenai korupsi barangkali karena kajian antropologi yang berasal dari pemahaman masyarakat 'primitif' yang eksotik, yang belum mengenal korupsi, tetapi Atlas (1985:15) mengatakan bahwa pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah problem yang berusia tua dan semua masyarakat manusia, kecuali yang sangat primitif, dan dengan derajat yang berbeda-beda, dijangkiti oleh korupsi.

Korupsi tentu saja belum terjadi pada kelompok masyarakat *band* yang nomaden di gurun Kalahari seperti pada orang Bushman !Kung, atau barangkali di beberapa kelompok kesukuan di pedalaman Papua, yang masih hidup dalam 'zaman batu'. Mereka belum mengenal mata uang sebagai barang yang dapat memberikan kenikmatan dan 'kekuasaan', sehingga bisa dikorup. Anggapan korupsi terjadi setelah adanya kesadaran perlunya mata uang sebagai alat yang dapat memuaskan

³ Teten Masduki, "Melawan Budaya Korupsi", *Kompas* Selasa, 19 Desember 2000.

kebutuhan material dan pada sisi lainnya mulai melonggarnya buhul yang mengikat anggota masyarakat sebagai satu kesatuan yang terikat ke dalam suatu tatanan yang tidak hanya dilihat sebagai ikatan-ikatan profan di antara para anggotanya, tetapi adanya buhul sakral yang menyatukan di antara anggota masyarakatnya. Buhul itulah yang memberikan batasan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, sehingga kalau dilanggar diyakini akan menerima sanksi atau hukuman yang telah diketahui bersama. Secara antropologis buhul tersebut sering dikatakan sebagai nilai-nilai, norma, aturan, atau kebudayaan. Sehingga pada masyarakat Trobriand yang telah mengenal *soulava* dan *mwali* sebagai 'mata uang', tidak terjadi *money politics*,⁴ atau korupsi. Oleh karena itu korupsi secara hipotetif dapat dikatakan terjadi setelah adanya sistem kepemimpinan pada suatu komunitas di mana terdapat jenjang sosial dan telah dikenalnya kepemilikan pribadi akibat masuknya pengaruh industrialisasi.

⁴ Lihat, Kartini Sjahril, 1999. 'Antropologi Melihat *Money Politics*', dalam *Antropologi Indonesia*. 23 (59). Hal. 46-52.

Karl Marx pernah menyatakan bahwa bentuk komunisme primitif belum mengenal adanya kepemilikan pribadi, segala sesuatu adalah milik komunal. Dalam masyarakat seperti itu belum ada 'kelas', yang dalam pengertian Marx sebagai kepemilikan alat-alat produksi dan memiliki ukuran-ukuran ekonomis. Kelas dalam pengertian penggolongan yang pertama muncul di dalam masyarakat adalah berdasarkan jenis kelamin. Untuk Indonesia, 'menurut Wertheim, konsep korupsi sudah dikenal di dalam sistem birokrasi patrimonial kerajaan-kerajaan di Jawa, jauh sebelum mengalami kolonialisasi. Upeti atau pajak yang ditarik kerajaan saat itu tidak luput dari penyunatan.'⁵

Untuk menjawab pertanyaan di atas, lebih baik untuk memahami apa saja yang dimaksud dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Konotasi yang melekat dengan korupsi adalah apabila seorang pejabat pemerintah atau pegawai negeri mengambil kekayaan negara yang tidak merupakan haknya secara tidak sah dengan memanfaatkan kedudukannya. Namun dari beberapa literatur

⁵ Teten Masduki, *Ibid*.

yang
korup
luas.
korup
fenom
pan (
tion),

Alata
senan
satu
umun
rahas
begitu
dalam
indiv
atau
lingk
untuk
atan
demi
korup
siaan
elem
ngan
dan
senar
Mere
cara-
berus
perbu
di ba
Mere
adala
ngin
yang
mam
kepu

yang mendiskusikan mengenai korupsi, makna korupsi lebih luas. Alatas menyatakan bahwa korupsi mencakup tiga tipe fenomena, di antaranya penyuaipan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (1985:12).

Ciri-ciri korupsi menurut Alatas, di antaranya; (a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, (b) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali kalau ia telah begitu merajalela dan begitu dalam berurat-berakar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka. Namun, sekalipun demikian, bahkan di sini motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya. (c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang. (d) Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. (e) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. (f)

Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. (g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan. (h) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. (i) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tata-nan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus (Alatas, 1985:12-14).

Masih mengikuti Alatas, fenomena lain yang bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik. Kita menyebut hal ini nepotisme (Alatas, 1985:11). Adanya nepotisme merupakan faktor yang memudahkan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Apalagi kalau anggota kerabat, teman atau rekan yang diberikan pada jabatan-jabatan publik berada di bawah subordinasi seseorang, baik dari sisi jabatannya atau dari ikatan-ikatan primordial yang mengikat

mereka. Di dalam masyarakat dapat diamati penghormatan diberikan kepada seseorang yang 'di atas', misalnya seseorang yang dianggap sebagai bapak, sebagai kakak, atau sebagai guru. Masih ada keengganan untuk melakukan tindakan kepada seseorang yang dianggap sebagai 'orang yang di atas', apalagi kalau orang yang dimaksud adalah pejabat pada suatu instansi pemerintah atau perusahaan. Pengawasan melekat sangat kuat dalam zaman orde baru, yang bersifat represif terhadap bawahan.

Kolusi (*collusion*) menurut kamus *The American Heritage Dictionary of English Language* (1976) berarti *an agreement for a deceitful or fraudulent purpose* (suatu permufakatan bagi suatu tujuan perbuatan yang curang atau bohong). Dengan demikian adanya hubungan-hubungan antara beberapa pihak yang saling mengetahui perbuatan yang tidak benar dilakukan dan dijaga kerahasiaannya. Beberapa orang yang terlibat di dalamnya saling menjaga dan melindungi perbuatan curang atau perlakuan yang salah terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Oleh karena itu kolusi dilihat sebagai bagian dari tindakan yang dilakukan oleh

para aktor yang terlibat di atas panggung korupsi yang dimainkannya. Dengan demikian nepotisme dan kolusi merupakan satu kesatuan dengan tindakan korupsi yang dilakukan. Satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan atau dilihat secara parsial.

Kolusi dan nepotisme kalau dilihat dari perspektif pelaku memperlihatkan adanya hubungan-hubungan dari beberapa pihak yang saling terlibat di dalam kasus korupsi itu sendiri. Adanya beberapa aktor yang memainkan peran secara bersama dalam berkolaborasi untuk tujuan-tujuan yang curang. Di antara mereka akan menjaga untuk saling menutupi dan menjaga kerahasiaan semua kecurangan atau kebohongan yang melingkupi korupsi yang dilakukan.

Konsep jaringan sosial (*social network*) dapat dipakai dalam menjelaskan fenomena ini. Konsep Jaringan sosial pertama kali diajukan oleh J.A. Barnes. Dapat dikatakan sebagai 'suatu pengelompokan yang terdiri atas tiga orang atau lebih, yang masing-masing orang tersebut mempunyai identitas tersendiri, dan yang masing-masing dihubungkan antara satu dengan lainnya melalui hubungan-

hubungan sosial yang ada, sehingga melalui hubungan-hubungan sosial tersebut mereka dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial atau kelompok sosial' (Suparlan: 1986). Oleh Bott dan Barnes, menunjukkan bahwa jaringan-jaringan sosial dapat digunakan untuk menginterpretasi perilaku di dalam berbagai variasi situasi sosial yang luas dan tidak terbatas hanya pada situasi peran-peran konjungal.⁶ Dengan demikian konsep jaringan sosial ini juga berguna dalam menganalisa keterlibatan seseorang dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang lain yang telah termasuk di dalam sistem sosial di mana pelaku melakukan aksinya. Orang-orang yang terlibat tersebut dapat dikatakan sebagai *person*, yaitu sebagai "the components or units of social structure" (Radcliffe-Brown, 1952:9).

Jika hubungan-hubungan sosial (*social relation*) itu merupakan suatu pola dari beberapa individu pada suatu situasi sosial tertentu yang berulang, maka di antara mereka telah ada suatu struktur sosial

yang mengatur hubungan-hubungan orang yang berada di dalamnya. *I regard as a part of the social structure all the social relations of person to person*, kata Radcliffe-Brown (1952:191). Maka struktur sosial dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan yang mengatur person-person, yang membuat masyarakat menjadi teratur. Keteraturan tersebut jika dilihat lebih mendalam adalah adanya saling hubungan di antara person-person pada setiap situasi yang reguler. Maka di dalam masyarakat banyak terdapat jaringan sosial, di mana seorang individu bisa terlibat pada beberapa jaringan sosial pada situasi yang berbeda-beda. Setiap individu akan memiliki beberapa jaringan sosial yang berbeda dengan individu lainnya. Titik jaringannya (*person*) bisa sama dan juga berbeda. Jaringan-jaringan sosial tersebut berada di dalam pranata sosial atau yang disebut Radcliffe-Brown dengan *institutions*, yaitu *the established norms of conduct of a particular form of social life* (suatu norma-norma yang mapan tentang perilaku dari suatu perilaku khusus dari kehidupan sosial) (Radcliffe-Brown, 1952:10).

Di dalam sebuah kantor, sebagai sebuah situasi dan

⁶ Ruddy Agusyanto & R.P.Lukito, *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Draft buku yang belum diterbitkan. Hal. 21.

hubungan sosial yang ada, sehingga melalui hubungan-hubungan sosial tersebut mereka dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial atau kelompok sosial' (Suparlan: 1986). Oleh Bott dan Barnes, menunjukkan bahwa jaringan-jaringan sosial dapat digunakan untuk menginterpretasi perilaku di dalam berbagai variasi situasi sosial yang luas dan tidak terbatas hanya pada situasi peran-peran konjungal.⁶ Dengan demikian konsep jaringan sosial ini juga berguna dalam menganalisa keterlibatan seseorang dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang lain yang telah termasuk di dalam sistem sosial di mana pelaku melakukan aksinya. Orang-orang yang terlibat tersebut dapat dikatakan sebagai *person*, yaitu sebagai "the components or units of social structure" (Radcliffe-Brown, 1952:9).

Jika hubungan-hubungan sosial (*social relation*) itu merupakan suatu pola dari beberapa individu pada suatu situasi sosial tertentu yang berulang, maka di antara mereka telah ada suatu struktur sosial

yang mengatur hubungan-hubungan orang yang berada di dalamnya. *I regard as a part of the social structure all the social relations of person to person*, kata Radcliffe-Brown (1952:191). Maka struktur sosial dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan yang mengatur person-person, yang membuat masyarakat menjadi teratur. Keteraturan tersebut jika dilihat lebih mendalam adalah adanya saling hubungan di antara person-person pada setiap situasi yang reguler. Maka di dalam masyarakat banyak terdapat jaringan sosial, di mana seorang individu bisa terlibat pada beberapa jaringan sosial pada situasi yang berbeda-beda. Setiap individu akan memiliki beberapa jaringan sosial yang berbeda dengan individu lainnya. Titik jaringannya (*person*) bisa sama dan juga berbeda. Jaringan-jaringan sosial tersebut berada di dalam pranata sosial atau yang disebut Radcliffe-Brown dengan *institutions*, yaitu *the established norms of conduct of a particular form of social life* (suatu norma-norma yang mapan tentang perilaku dari suatu perilaku khusus dari kehidupan sosial) (Radcliffe-Brown, 1952:10).

Di dalam sebuah kantor, sebagai sebuah situasi dan

⁶ Ruddy Agusyanto & R.P.Lukito, *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Draft buku yang belum diterbitkan. Hal. 21.

hubungan sosial yang terpola, jaringan sosial yang terbentuk akan memperkuat terjadinya korupsi. Korupsi mungkin saja dilakukan oleh seseorang tanpa melibatkan orang lain, tetapi tindakan individual seperti ini akan dengan cepat dapat diketahui oleh person yang lain, kecuali person yang mengetahui kemudian diberikan *uang tutup mulut*, supaya tidak membuka secara luas kasus korupsi yang telah dilakukan. Tindakan yang terakhir ini menjadikan person yang menerima *uang tutup mulut* itu menjadi terlibat dan masuk ke dalam jaringan tindakan korupsi, dan tindakan selanjutnya adalah saling menjaga kerahasiaan di antara sesamanya. Semakin bertambah banyak person yang terlibat seperti itu, atau barangkali sudah terlibat sejak dari awal dari tindakan korupsi dilakukan akan memperjelas saling keterkaitan atau adanya jaringan sosial di antara mereka. 'Untuk kasus seperti ini Wolfe mengusulkan sejumlah istilah baku, yaitu *unlimited social network* dan bisa juga dilihat sebagai *limited social network*. *Unlimited social network* yang oleh Barnes disebut *total social network*, adalah keseluruhan jaringan sosial yang mungkin

menjadi saluran dari segala kegiatan sosial seorang individu (*Alpha*) dalam hidupnya. *Limited social network* yang disebut *partial social network* oleh Barnes, adalah suatu bidang tertentu dalam jaringan sosial total seorang individu' (Koen-tjaraningrat, 1990:158).

Jaringan sosial memperlihatkan bukan apa yang diketahui oleh pelaku tetapi siapa yang diketahuinya. Mengacu kepada interaksi dan saling hubungan di antara kelompok orang atau person. Kedekatan dan saling hubungan memberikan basis kognitif pertama terhadap tindakan yang akan diambil selanjutnya dengan sasaran kepada pencapaian tujuan akhir, yaitu terdapatnya keuntungan material. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mantan Presiden Soeharto semasa berkuasa menjalankan praktek nepotisme dengan anggota keluarganya dan pihak lain yang disebut kroni-kroninya, sehingga Soeharto dan anak-anaknya ditaksir oleh sekelompok jurnalis dari majalah Time memiliki kekayaan sebanyak 15 milyar dolar, yang dicurinya dari rakyat itu diterbitkan pada tanggal 24 Mei 1999 (Oltman, 2001:57-58). Jaringan sosial yang dibentuk memperkuat dan

menghilangkan bentuk-bentuk penyelewengan atau korupsi yang dilakukan.

Kasus dana non bujeter Bulog yang menghebohkan melibatkan banyak pihak yang terkait dalam jaringan sosial, baik di dalam Bulog sendiri maupun di luarnya yang melibatkan kekuasaan. Saling keterkaitan person, adanya jaringan dari kasus akan melibatkan banyak pihak, kalau kasus ini ditelanjangi. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang bukan merupakan orang-orang yang miskin, dilakukan melibatkan jaringan sosial yang luas dan cenderung digunakan untuk tujuan-tujuan mempertahankan kekuasaan dengan jalan *money politics*. Pada banyak partai politik seseorang yang akan diajukan sebagai wakil partai di DPR atau DPRD diminta memberikan sumbangannya terhadap partai. Besar sumbangannya sangat menentukan terhadap kedudukannya. Konsekwensi yang mengiringinya adalah kurangnya kredibilitasnya dalam memerangi korupsi yang terjadi setelah memperoleh jabatan.

Korupsi yang dilakukan oleh pegawai golongan bawah didorong oleh kurangnya pendapatan yang diperoleh. Gaji yang tidak mencukupi memaksa

seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, secara wajar atau tidak. Korupsi yang dilakukannya masih pada batas-batas tertentu. Seperti pungutan-pungutan atau *uang pelicin* yang tidak semestinya dilakukan kepada orang-orang yang dilayannya. Atau dengan jalan mengurangi jam kerja tetapi tetap mengambil honor sebanyak waktu yang ditetapkan sebelumnya.

Hubungan patron klien yang terdapat dalam struktur kepegawaian, dan pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya, cenderung memberikan peluang terjadinya korupsi pada pegawai golongan rendah. 'Praktis kalau atasannya korup, maka ia dengan sendirinya kehilangan kewibawaan di depan bawahannya untuk menegakkan integritas lembaganya. Mungkin korupsi di tingkat bawah justru ditolerir hingga batas tertentu agar roda birokrasi tetap jalan dan tidak mengganggu kue jatah atasan'.⁷

Birokrasi yang berbelit-belit, membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Jalan pintas sering dilakukan, bahkan ditawarkan oleh pegawai kantor

⁷ Teten Masduki, *Ibid*

pemerintah yang melayani masyarakat dengan jaminan urusan yang dilakukan dapat selesai dengan cepat, dengan memberi imbalan yang dimintanya. Kondisi birokrasi yang panjang dan berbelit memungkinkan terjadinya korupsi, baik berupa pungutan atau penyelewengan administratif.

C. Modernisasi dan Perubahan Kebudayaan

Smelser (1994; 59-60) menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada empat proses yang berbeda tetapi saling berhubungan yang terdapat dalam proses pembangunan (modernisasi). 1. Dalam bidang teknologi, suatu masyarakat yang sedang berkembang sedang mengalami perubahan dari penggunaan teknik-teknik yang sederhana dan tradisional ke arah penggunaan pengetahuan ilmiah. 2. Dalam bidang pertanian, masyarakat yang berkembang itu sedang beralih *dari* pertanian sederhana *ke arah* produksi hasil pertanian untuk pasaran. Ini berarti pengkhususan dalam jenis tanaman yang akan dijual hasilnya, pembelian barang-barang non pertanian di pasaran dan sering juga kerja upahan dalam bidang pertanian. 3.

Dalam bidang industri, masyarakat yang sedang berkembang sedang mengalami suatu peralihan dari penggunaan tenaga manusia dan binatang ke industrialisasi yang sebenarnya atau orang-orang yang bekerja untuk upah pada mesin-mesin yang digerakkan oleh sumber tenaga yang menghasilkan barang dagangan yang dijual di luar kalangan yang menghasilkannya. 4. Dalam susunan ekologi perkembangan masyarakat yang bergerak dari sawah/ladang dan desa ke pemusatan-pemusatan di kota. Menurut Smelser istilah modernisasi adalah suatu konsep yang sekeluarga dengan istilah pembangunan ekonomi, tetapi lebih luas lagi jangkauannya (1994;60).

J.W. Schoorl menyatakan bahwa modernisasi masyarakat adalah suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya (1985; 1). Kemudian lebih dijelaskan lagi bahwa modernisasi masyarakat sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau semua aspek-aspek masyarakat (1985; 4).

Lebih jauh Alex Inkeles (1994) melihat kepada manusia

yang dik
modern.
nusia m
nisikan
sembilan
Adanya
menerim
laman b
pembaha
mempun
memben
pendapat
persoalar
yang t
sekitarny
Di sam
mengena
bersifat
menerim
yang be
secara
Apabila
pada ma
dan sela
4. Men
Memilik
menyaki
dan yak
belajar,
tertentu,
untuk ke
Percaya
tertib di
7. Sadar
lain da
gainya. 8
teknolog

dilakukan tanpa ada intimidasi atau keterpaksaan.

D. Masyarakat Indonesia, Pemenuhan Kebutuhan dan KKN.

Masyarakat Indonesia sampai sekarang sebagian besar masih merupakan masyarakat pedesaan yang hidup di dalam lingkungan kebudayaan suku bangsa. Everett M. Roger (1968) menyatakan bahwa masyarakat desa mempunyai ciri-ciri tertentu yang dikatakan sebagai *peasant*. Lebih jauh ada konsep *familism* yang merupakan salah satu bentuk *subculture of peasantry*. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan keluarga. Keluarga menjadi dasar dari hubungan dengan orang lain di luar keluarga mereka, dan ada saling ketidakpercayaan (*mutual distrust*) dengan individu-individu yang bukan dari keluarga mereka. Pemenuhan kebutuhan ini bagi masyarakat desa masih terbatas sifatnya. Menurut Roger masyarakat petani desa yang disebutnya sebagai *peasant* memiliki keterbatasan inovasi, karena pola-pola hidupnya cenderung mengikuti cara-cara yang

diketahuinya menghasilkan walaupun dalam skala yang kecil daripada mencoba ide-ide baru dan mereka takut melakukan sesuatu yang baru tersebut. Justru karena inilah masyarakat petani desa (*peasant*) dianggap belum sebagai modern, jika dipakai salah satu ciri orang modern dari Inkeles, yaitu kesediaan untuk menerima pembaharuan sebagai suatu ciri yang tetap dan umum dalam pelbagai pengalaman manusia (1994: 90).

Jika *subculture* familisme dari Roger ini diperluas, rupa-rupanya masih terdapat pada masyarakat perkotaan di Indonesia, jika dilihat dari adanya praktek-praktek KKN yang dilakukan. Kota-kota di Indonesia jauh berkembang setelah Indonesia merdeka dan sebagian menjadi kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, membawa implikasi yang besar terhadap masyarakatnya. Masyarakat yang semula hidup di daerah pedesaan mulai mengenal kehidupan di daerah perkotaan. Ini membawa implikasi terhadap perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan dipengaruhi oleh masuknya teknologi dari negara-negara maju dan berkembangnya pendidikan di Indonesia. Dikembangkan dengan pengertian

manusia modern yang diberikan oleh Inkeles atau modernisasi menurut Smelser di atas, apabila semua item yang diberikan tersebut diterima dan dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakatnya berarti telah terjadi perubahan kebudayaan. Jika diperhatikan lebih jauh, nampaknya perubahan besar yang terjadi dari masyarakat desa ke masyarakat kota yang banyak menonjolkan ciri-ciri modernisasi atau masyarakat modern, ternyata masih meninggalkan 'ciri-ciri asli' masyarakat petani desa dengan *subculture of peasantry*. Masyarakat kota yang semula hidup di desa dengan kebudayaan suku bangsa dengan masih memperlihatkan ciri-cirinya *subculture of peasantry* sebagaimana yang dinyatakan oleh Roger. Praktek KKN yang banyak terjadi di Indonesia sejak masa orde baru dan bahkan sekarang setelah reformasi adalah memperlihatkan masih kuatnya *familism* dari *subculture of peasantry* dan pada sisi lainnya terdapat nafsu untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak lagi terbatas. Baru-baru ini di Kota Palu praktek nepotisme masih dilakukan dalam seleksi penerimaan CPNS (Kompas, 9

November 2002). Syamsuddin Haris bahkan mengatakan bahwa tiga cabang pemerintah, yakni eksekutif, legislatif dan lembaga yudikatif sudah tidak mempunyai 'budaya malu' dengan banyaknya kasus 'arisan korupsi' yang terjadi pada ketiga cabang pemerintah tersebut (Kompas, 7 Nov. 2002).

Nilai-nilai *peasantry* tidak dengan mudah hilang meskipun telah memasuki kehidupan masyarakat perkotaan yang berasal dari beragam suku bangsa, ikatan-ikatan primordial malah menjadi pilihan untuk memperkuat kedudukan dan menciptakan solidaritas. Perubahan kebudayaan tidak berlangsung sepenuhnya jika dilihat dari perubahan yang terjadi dan masih kuatnya nilai-nilai atau mental *familism* ini. Sebagaimana dikatakan juga oleh Geertz bahwa 'Primordialisme inilah yang merupakan pengikat asli masyarakat Indonesia dan atas dasar ikatan itulah pengelompokan-pengelompokan masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang, baik dalam organisasi-organisasi sosial informal dan formal, asosiasi-asosiasi, organisasi massa, pemerintahan, partai politik, maupun pada organisasi-organisasi yang bertujuan ekonomi' (Geertz,

1963). Mental familiisme ini dapat menjadi nilai-nilai baik apabila diarahkan menjadi dasar dari organisasi atau bentuk-bentuk primordialisme yang justru bertujuan untuk kepentingan orang banyak seperti yayasan / foundation yang memberikan bantuan untuk orang-orang miskin.

E. Penutup

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia meningkatkan kebutuhan tidak lagi sekedar kebutuhan subsistensi untuk keluarga seperti yang terdapat pada masyarakat desa, tetapi berlimpahnya kebutuhan-kebutuhan lain yang mesti dipenuhi, yang kadang bisa tidak terbatas sebagai manusia modern. KKN dilakukan oleh banyak individu / person, terutama di daerah kota yang memberikan peluang untuk itu. KKN ini diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan individu, keluarga dan kelompok.

Terjadi perubahan kebudayaan, apabila dilihat perubahan dari masyarakat desa ke masyarakat kota. Tetapi perubahan yang terjadi belum menghilangkan *subculture peasantry* jika dilihat kepada

besarnya pelanggaran aturan atau norma atau nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki dengan banyaknya perilaku KKN. Kalau dilihat ciri modernisme yang diberikan oleh Smelser dan ciri manusia modern oleh Inkeles, sebagian masyarakat kota di Indonesia yang telah mengalami modernisasi ternyata masih terdapat nilai-nilai asli lama yang masih bertentangan dengan prinsip modernisasi itu sendiri. Pola pikir yang rasional dan ilmu pengetahuan yang dimiliki malah digunakan untuk membuat peluang bagi kepentingan keluarga/kelompok. Pada satu sisi konsep manusia modern dari Inkeles dapat diterima, di sisi lainnya pada orang-orang yang melakukan KKN masih menganut nilai-nilai atau memiliki pengetahuan dari masyarakat *peasant*, yang tidak mencerminkan sebagai orang yang telah mengalami modernisasi.

Faktor *familism* memperlihatkan masih kuatnya ikatan-ikatan kekerabatan dan primordialisme. Nepotisme jelas sekali dalam hal ini, sebagai perwujudan dari mental *peasant* yang terdapat dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan sebagian besar masyarakat juga mempengaruhi terpeliharanya mental familiisme, dengan tujuan untuk

dilakukan melalui pendidikan yang tepat. Di samping itu peningkatan perekonomian masyarakat melalui penambahan penghasilan, penegakan hukum, dan melakukan pengawasan

secara menyeluruh sangat berperan dalam penegakan aturan pada setiap lembaga, serta sanksi yang lebih tegas diharapkan mereduksi tindakan korupsi.

Daftar Bacaan

- Alatas, Syed Hussein. 1985. **Sosiologi Korupsi**. Jakarta: LP3ES
- , 1988. **Intelektual Masyarakat Berkembang**. Jakarta: LP3ES.
- Agusyanto, Ruddy & R.P.Lukito, **Jaringan Sosial dalam Organisasi**. Draft buku yang belum diterbitkan.
- A.R. Radcliffe-Brown. 1952. **Structure and Function in Primitive Society, Essay and Addresses**. London: The Free Press, Collier Mcmillan Publishers.
- Geertz, Clifford. 1963. 'The Integrative Revolution', dalam Geertz, Clifford (ed.) **Old Societies and New Nations**. Illinois: Free Press of Glencoe.
- Ginsburg, Norton. 1994. 'Kota dan Modernisasi' dalam Myron Weiner (editor), **Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan**. Voice of America Forum Lecture (Yogyakarta: Gajahmada Univ. Pres.).
- Haris, Syamsudin. 'Budaya Malu dan "Arisan Korupsi"', *Kompas* Kamis, 7 November 2002.
- Inkeles, Alex. 1994. 'Modernisasi Manusia' dalam Myron Weiner (editor), **Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan**. Voice of America Forum Lecture (Yogyakarta: Gajahmada Univ. Pres.).
- Koentjaraningrat. 1990. **Sejarah Teori Antropologi II**. Jakarta: UI-Press.
- Mauss, Marcel. 1992. **Pemberian. Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Masduki, Teten. 'Melawan Budaya Korupsi', *Kompas* Selasa, 19 Desember 2000.